

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A. Ridjwan Halim dan Flora Liman Pangestu. *Persoalan Praktis Filsafat Hukum Dalam Himpunan Distingsi*, 1992, Universitas Atma Jaya, Jakarta, hlm. 4.
- A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, 2008, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 8.
- Abdulkadir, Muhammad 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 73.
- Agus, Bustanuddin, 2007, *Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.
- Atmasasmita, Romli, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publising, Yogyakarta, hlm. 59-60.
- Badriyah, Siti Malikhatun, 2016, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, Sinar Grafika, hlm. 17.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata (BW)*, 1981, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, hlm. 38.
- Basuki. H, 2015, *Mengenal Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Laku Hidup dalam Manajemen Manunggaling Kawulo Gusti*, PT Mimbar Media Utama, Semarang.
- D. Hendropuspito, 2006, *Sosiologi Agama*, cet. 20, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 34.
- Dahwal, Sirman, 2017, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Mandar Maju, hlm. 73.
- Dajaha, Meliala S., *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, hlm. 34.
- Damami, M, 2011, *Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada periode 1973-1983: Sebuah sumbangan pemahaman tentang proses legalisasi konstitusional dalam konteks pluralitas keberagamaan di Indonesia*, Kementerian Agama RI, Jakarta.
- Darmabrata, Wahyono 2009, *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan*, Jilid 1, Rizkita, Jakarta, hlm.55-58.
- Djubaidah, Neng, 2012, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 207.
- Dr. Mardani, 2017, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 53.
- E.S. Ekadjali et.al., *Sejarah Kebangkitan Nasional Jawa Barat*, Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1978/1979, Bandung, Hlm. 30.

- Fuady, Munir, 2014. *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- H.F.A. Völlmar, 1982, *Hukum Keluarga Menurut KUH Perdata*, Tarsito, Bandung, hlm. 23.
- Harahap, A. Bazar, 2007, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Percerndo, Jakarta, hlm. 6.
- Harun, H.M Shaleh , 1984, *Latar Belakang Umat Islam Menerima Pancasila Sebagai Asas Tunggal*, Aquarius, Yogyakarta, hlm. 79.
- IGN Nurdjana, 2009, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia: Peran Polisi, Bakorpakem dan Pola Penanggulangan*, Pustaka Pelajar, hlm. 53.
- K. Sukardji, 1993, *Agama-Agama Yang Berkembang Di Dunia Dan Pemeluknya*, cet. 1, Penerbit Angkasa, Bandung, hlm. 34-35.
- K.R.Maratt, 1966, *Agama Dan Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 13-14.
- Kartohadiprodjo, Soediman, 1984, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 36.
- Kelsay, J., dan Twiss, S. B., 1997, *Agama dan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Pelajar.
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2002, *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Sebuah Wacana)*, Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan ASDEP Urusan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Jakarta, hlm. 14.
- Kusuma-atmadja, Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran & Penerbit Binacipta, Bandung, hlm. 1.
- M. Dhavamony, 1995, *Fenomenologi Agama*, Kanisius, Jakarta, hlm. 74.
- M. Hardjana, Agus, 2005, *Religiositas, Agama, Dan Spiritualitas*, cet. 1, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 51.
- MA, Saifudin Azwar, 2007, *Metode Penelitian*, Cet-V, IIPustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 36.
- Maarif, Samsul, 2017, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama di Indonesia*, CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Yogyakarta, hlm. 5.
- Mahmudi, Sri, 2010, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, hlm. 30.
- Manan, Abdul, 2012, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 19.
- Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm. 3-15.
- Muladi ,2005, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 70.
- Noor, Fauz , 2009, *Berpikir Seperti Nabi*, cet. 1, Lkis Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 449.

- Notonagoro, 1974, *Pancasila Dasar Palsafah Negara*, cet 4, Pancuran Tujuh, Jakarta, hlm. 32.
- Nurdjana. I, 2009, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, 1988, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, Surabaya, hlm.28-29.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, 2002, *Dalam Sudikno Mertokusumo, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 61.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1960, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, hlm. 7.
- Purbopranoto, Kuntjoro, *Hak Asasi Manusia dalam Pancasila*, dalam buku Santiaji Pancasila ditulis oleh Prof. Dardji Darmodiharjo, hal. 51.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, cet. 5, 1986, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 13.
- Sekretariat Tuntunan Agung Kerokhanian Sapta Darma, 2010, *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma dan Pelajaran Panutan Agung Sri Gutama*, Sanggar Candi Sapta Rengga, Yogyakarta.
- Shidarta, “*Posisi Pemikiran Teori Hukum Pembangunan*”, hlm. 14-16
- Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, CV Utomo, Jakarta, hlm. 411.
- Subagyo, Rahmat, 1993, *Kepercayaan Kebatinan-Kerohanian-Kejiwaan Dan Agama*, Kanisius, yogyakarta, hlm. 30.
- Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 28, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 23.
- Sugiono, Bambang , 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sukirno, 2019, *Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Komunitas Adat*, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 2, 2019, hlm. 133.
- Suseno, Franz Magnis, 2001, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 121.
- Taher, Elza Peldi , 2009, *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*, cet. 1, ICRP, Jakarta, hlm. 368-369.
- Tanya Simanjuntak dan Hage, *Teori Hukum*, hlm. 139-140
- Tenggara, David I Iartadi, 2007, *Dampak Lahirnya UU Adminduk Terhadap Keabsahan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan*.
- Thalib, Sayuti, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. 2, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 47.

- Tjokrowisastro, Soedjito, 1985, *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil*, Bina Aksara.
- Todung, M. Lubis, 2005, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 65.
- Usman, Rachmadi, 2017, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Vol.14 No.3, Fakultas Hukum, 2017, hlm. 105.
- Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, cet. 1, 1991, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 36.
- W. Soetjipto, Ani, 2015, *HAM Dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Webster New World*, 1996, NY: McMillan, hlm. 1134.
- Wijayanti, Winda, 2019, *Penghayat Kepercayaan Perlindungan Hukum melalui Hukum Administrasi*, Rajawali Pers, hlm. 5.
- Winarsih Imam Subekti dan Sri Soesilawati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, 2005, Gitama Jaya, Jakarta, hlm. 43.
- Zamroni M, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan*, hlm. 144.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

*Universal Declaration of Human Rights*

Peraturan Bersama Menteri Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Terhadap Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan Nomor 97/PUU/XIV/2016

### C. JURNAL

- Aan Andrianih, 2009, Perlindungan Negara Terhadap Keyakinan Beragama bagi Masyarakat Hukum Adat Terkait Permasalahan Kolom Agama pada Dokumen Kependudukan, Jurnal Rechtvinding..
- Herni Widanarti dan Rinitami Njatrijani, 2019, 'Implementasi Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 terhadap Pelaksanaan Perkawinan pada Masyarakat Adat Samin (Sedulur Sikep) di Jawa Tengah, E-Journal Undip.
- Honing Sannya, John Pieris, Daniel Yusmic P. Foekh, 2021, HAK ASASI MANUSIA, DEMOKRASI DAN PANCASILA DI INDONESIA, E-jurnal to-ra UKI
- Liky Faizal, 2018, Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan, ASAS: Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi Dan Kebudayaan Islam 8, no. 2.
- Trusto dan Subekti, 2010, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian. Jurnal Dinamika Hukum. Vol 10(3), hal. 338.

### D. INTERNET

- Anggara, 2012, Hak Penghayat Kepercayaan untuk Diakui dalam Kolom Agama di KTP, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fa4e6aa575bc/peneraan-kepercayaan-dalamktp>, diakses pada tanggal 8 April 2024.
- Bastian Gaguk, 2011, Agama dan Perubahan Sosial: Sebuah Telaah Pemikiran Karl Marx dan Emile Durkheim. <http://filsafat.kompasiana.com/2011/03/15/agama-dan-perubahan-sosialebuah-telaah-pemikiran-karl-marx-dan-emile-durkheim/>, diakses pada tanggal 7 April 2024.
- Dian Mustika, 2011, Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam, INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 5, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/534>. Diakses 4 april 2024.
- <http://kamusbahasaindonesia.org/agama>, diakses pada tanggal 11 Maret 2024.
- <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1247>, diakses 5 April 2024.
- Mehulika Sitepu, 2018, Usulan MIU terkait kepercayaan: Patutkah ada dua jenis KTP?, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia42720435>. Diakses pada tanggal 9 April 2024.
- Nurul Firmansyah, 2015, Setelah Konstitusi Mengakui Penghayat Kepercayaan, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://programpeduli>

